

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan diatas, peneliti akan menjelaskan hipotesis dengan kesimpulan berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang.
4. Secara simultan PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Hasil koefisien determinasi adalah 90,4% yang merupakan kontribusi dari Belanja Modal dan tiga variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan sisanya 9,6% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat di luar penelitian ini.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal – hal berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Kupang. Cara untuk meningkatkan

PAD yaitu dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah dan memperluas *tax-base* pajak daerah . Semakin besar PAD maka semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi peneliti – peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Pemerintah Kota Kupang, dengan mengangkat objek penelitian pada produk ekonomi lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkos Kosim. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Anggaran Belanja modal Kota Banjar*
- Halim Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- <https://money.kompas.com/read/2021/05/20/141500826/sri-mulyani-lagi-lagi-jengkel-pemda-banyak-alokasikan-belanja-untuk-pegawai>, diakses pada 10 Juli 2021 pukul 18:34
- Imaniar Putri Mahargono.2017. *Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*
- Kantor Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang
- Mardiasmo. (2002) . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nugroho. (2005), *Uji Asumsi Klasik dalam Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Pustaka.
- Nurharibnu Wibisono, Arini Wildaniati. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal*
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing
- Rudi Hermawan. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah

Yohanes Cosmas Simbolon, Azhar Maksun, Erwin Abubakar.2020. *Pengaruh PAD, DAU, SILPA, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu Periode 2012-2018.*